

## PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Pupung Purnamasari<sup>1</sup>, Velintinus Riyan Tamba<sup>2</sup>, Puji Rahayu<sup>3</sup>, Wilda Sari<sup>4</sup>

[pupungpurnamasari@pelitabangsa.ac.id](mailto:pupungpurnamasari@pelitabangsa.ac.id)<sup>1</sup>, [velintinusriyantamba@gmail.com](mailto:velintinusriyantamba@gmail.com)<sup>2</sup>,

[puijasmarandhika13@gmail.com](mailto:puijasmarandhika13@gmail.com)<sup>3</sup>, [wildasari066@gmail.com](mailto:wildasari066@gmail.com)<sup>4</sup>

Universitas Pelita Bangsa

### **Abstract**

*In the Indonesian economy, micro, small and medium enterprises (MSMEs) are critical to distributing income, creating jobs and reducing poverty. However, the industry experiences significant difficulties in obtaining funding which is a significant barrier to business expansion. Investigating the barriers MSMEs face in accessing funding, exploring possible sources of funding, and analyzing financial sector innovations that can aid MSME growth are the objectives of this study. To provide a comprehensive picture of the problems MSMEs face and the measures that have been calculated to address them, this research utilizes a literature study methodology to collect and examine various sources. The findings show that the biggest barriers for MSMEs to obtain financing are lack of information about funding possibilities, complicated banking processes, and insufficient financial literacy. On the other hand, fintech and venture capital are examples of financial innovations that present new opportunities with a more flexible, faster and inclusive approach. In order to build a sustainable supporting ecosystem, this study highlights the importance of cooperation between the government, financial institutions, and MSME players. MSMEs are expected to increase production capacity, open new markets, and develop innovations that drive equitable and sustainable national economic growth with improved access to financing. The useful suggestions from this study can help policymakers to create more efficient financing schemes to help MSMEs, which are the foundation of the Indonesian economy.*

**Keywords:** Access To Financing, Micro, Small And Medium Enterprises.

### **Abstrak**

Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat penting untuk mendistribusikan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Namun, industri ini mengalami kesulitan yang signifikan dalam memperoleh pendanaan yang merupakan penghalang signifikan bagi perluasan bisnis. Menginvestigasi hambatan-hambatan yang dihadapi UMKM dalam mengakses pendanaan, mencari sumber pendanaan yang memungkinkan, dan menganalisis inovasi sektor keuangan yang dapat membantu pertumbuhan UMKM merupakan tujuan dari penelitian ini. Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah yang dihadapi UMKM dan langkah yang telah diperhitungkan untuk mengatasinya, penelitian ini menggunakan metodologi studi literatur untuk mengumpulkan dan memeriksa berbagai sumber. Temuan menunjukkan bahwa hambatan terbesar bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan adalah kurangnya informasi tentang kemungkinan pendanaan, proses perbankan yang rumit, dan literasi keuangan yang tidak memadai. Di sisi lain, fintech dan modal ventura merupakan contoh inovasi keuangan yang menghadirkan peluang baru dengan pendekatan yang lebih fleksibel, cepat, dan inklusif. Dalam rangka membangun ekosistem pendukung yang berkelanjutan, studi ini menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM. UMKM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, membuka pasar baru, dan mengembangkan inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan dengan peningkatan akses pembiayaan. Saran-saran yang berguna dari penelitian ini dapat membantu para pembuat kebijakan untuk menciptakan skema pembiayaan yang lebih efisien untuk membantu UMKM, yang merupakan fondasi ekonomi Indonesia.

**Kata Kunci:** Akses Pembiayaan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

## **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah akses pembiayaan yang terbatas. Meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai program dan kebijakan untuk mendukung pembiayaan UMKM, banyak pelaku UMKM masih kesulitan mendapatkan dana yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya agunan yang dimiliki oleh UMKM, rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku usaha, serta prosedur perbankan yang masih dianggap rumit dan memakan waktu.

Peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan sektor ini. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi penyederhanaan prosedur kredit, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan alternatif sumber pendanaan seperti fintech dan modal ventura. Untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM juga harus terus meningkatkan sinergi. UMKM akan dapat tumbuh lebih cepat, berinovasi, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional jika memiliki akses pembiayaan yang lebih baik. Keberhasilan UMKM dalam mengakses pembiayaan akan membawa dampak positif yang luas. Tidak hanya pada tingkat individu pelaku usaha, tetapi juga pada tingkat makroekonomi. Dengan pembiayaan yang memadai, UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan menciptakan inovasi produk yang lebih berkualitas. Hal ini akan menciptakan lebih banyak peluang kerja, meningkatkan daya saing produk lokal, dan pada akhirnya, memperkuat ekonomi nasional.

Untuk memastikan bahwa program pembiayaan yang ada saat ini efisien dan tersedia bagi seluruh pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil, pemerintah dan lembaga keuangan harus terus meninjau dan memodifikasi kebijakan. Selain itu, sangat penting untuk mengedukasi dan mendukung para pelaku UMKM dalam hal manajemen keuangan dan penggunaan teknologi. Meskipun penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membuka akses ke pasar-pasar baru, literasi keuangan yang baik akan membantu para pelaku UMKM untuk mengelola uang yang mereka terima dengan lebih efektif dan efisien.

Untuk mendapatkan hasil terbaik, kerja sama antara sektor publik, komersial, dan komunitas dalam membantu UMKM memperluas akses keuangan dan mengembangkan kemampuan mereka harus lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, tujuan dari publikasi ini adalah untuk menyelidiki secara menyeluruh berbagai pendekatan dan peraturan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan. Penelitian ini juga akan mengevaluasi dampak dari upaya tersebut terhadap perkembangan UMKM di Indonesia, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan lembaga keuangan dalam merancang program pembiayaan yang lebih inklusif dan efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur atau kajian pustaka. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis berbagai

sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang memuat informasi terkait konsep dasar akses pembiayaan dan umkm, kendala akses pembiayaan bagi umkm dan sumber-sumber pembiayaannya, inovasi dalam pembiayaan umkm dan peran pemerintah serta kebijakan pendukung umkm, dan rekomendasi strategis peningkatan akses pembiayaan untuk umkm. Dalam proses ini, peneliti mengidentifikasi teori-teori, konsep, dan temuan-temuan empiris yang telah ada guna memahami kondisi terkini dan faktor-faktor yang mempengaruhi akses pembiayaan untuk UMKM. Kajian pustaka ini juga mencakup analisis kritis terhadap studi-studi sebelumnya untuk menemukan gap penelitian yang bisa dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana akses pembiayaan dapat ditingkatkan untuk mendukung perkembangan UMKM.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Definisi dan Konsep Dasar Akses Pembiayaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Akses pembiayaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mendapatkan dana yang diperlukan guna mendukung kegiatan ekonomi, bisnis, atau personal mereka. Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akses pembiayaan menjadi hal yang sangat krusial karena UMKM sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh dana yang diperlukan untuk memulai, mengembangkan, atau mempertahankan usaha mereka. Hambatan-hambatan tersebut bisa berupa kurangnya agunan, rendahnya literasi keuangan, prosedur perbankan yang kompleks, serta minimnya informasi tentang sumber pembiayaan yang tersedia. Akses pembiayaan yang baik akan memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan peluang bisnis, mengatasi tantangan ekonomi, dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional.

UMKM sendiri merujuk pada kategori usaha yang memiliki ukuran dan skala ekonomi lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Di Indonesia, UMKM dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet tahunan. Usaha Mikro biasanya memiliki aset hingga Rp 50 juta dan omzet hingga Rp 300 juta per tahun. Usaha Kecil memiliki aset antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dan omzet antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar per tahun. Sedangkan Usaha Menengah memiliki aset antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar dan omzet antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar per tahun. Meskipun ukurannya kecil, UMKM secara keseluruhan berkontribusi secara signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan pengentasan kemiskinan. Tidak dapat dibesar-besarkan betapa pentingnya ketersediaan pembiayaan bagi UMKM. UMKM dapat mengembangkan barang dan jasa mereka, meningkatkan kualitasnya, menjangkau konsumen yang lebih luas, serta melakukan investasi pada infrastruktur dan teknologi yang lebih baik berkat pembiayaan yang tersedia.

UMKM juga dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan luar negeri, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengelola risiko dengan lebih baik dengan bantuan keuangan. Namun, di lapangan, masih banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan sumber pendanaan yang memadai. Hal ini sering kali disebabkan oleh persyaratan yang ketat dari lembaga keuangan serta kurangnya pengetahuan tentang kemungkinan pendanaan yang dapat diakses. Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya harus bergerak secara proaktif untuk mempermudah UMKM memperoleh

pembiayaan dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Pemerintah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mendorong UMKM, menawarkan insentif kepada lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman kepada UMKM, serta memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku UMKM agar mereka lebih siap untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman.

Selain itu, inovasi di sektor keuangan seperti fintech juga memberikan harapan baru bagi UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih fleksibel dan cepat. Fintech dapat menyediakan solusi pinjaman yang lebih terjangkau dengan proses yang lebih efisien dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan akan bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan dalam jangka panjang. UMKM dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja jika mereka memiliki lebih banyak akses terhadap pendanaan. Selain itu, melalui pemerataan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi lokal, UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di mana mereka beroperasi jika mereka menerima bantuan keuangan yang memadai. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia. Edukasi keuangan, penyederhanaan prosedur, dan pengembangan alternatif pembiayaan menjadi kunci untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, UMKM dapat berperan optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## **B. Kendala Akses Pembiayaan Bagi UMKM dan Sumber-sumber Pembiayaan untuk UMKM**

Kendala akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan tantangan signifikan yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan sektor ini. Salah satu kendala utama adalah kurangnya agunan atau jaminan yang dapat disediakan oleh UMKM untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Banyak UMKM yang tidak memiliki aset tetap seperti tanah atau bangunan yang bisa dijadikan agunan, sehingga sulit memenuhi persyaratan perbankan. Selain itu, rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM juga menjadi hambatan besar. Banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya pencatatan keuangan yang baik, laporan keuangan yang akurat, dan manajemen keuangan yang efektif, yang semuanya menjadi syarat utama dalam pengajuan kredit.

Tantangan yang dihadapi UMKM dalam memperoleh pendanaan semakin diperparah dengan proses perbankan yang rumit dan birokratis. UMKM sering kali terhalang atau merasa tidak mampu mencari pinjaman karena prosedur pengajuan pinjaman yang panjang, persyaratan dokumen yang rumit, dan evaluasi kredit yang ketat. Hambatan lainnya adalah kurangnya pengetahuan tentang kemungkinan pendanaan yang dapat diakses. Program pemerintah atau perusahaan keuangan non-bank yang menyediakan pendanaan dengan persyaratan yang lebih mudah diakses dan fleksibel sering kali tidak diketahui oleh UMKM.

Namun demikian, UMKM memiliki sejumlah opsi pendanaan yang tersedia untuk mereka meskipun ada beberapa kendala. Opsi pembiayaan tradisional yang masih paling populer adalah lembaga keuangan formal seperti bank dan koperasi. Sebagai contoh, bank-bank besar di Indonesia menyediakan program pembiayaan eksklusif bagi UMKM dengan suku bunga yang kompetitif dan jangka waktu yang bervariasi. Berbeda dengan bank, koperasi juga memberikan pinjaman dengan persyaratan yang lebih

sederhana dan suku bunga yang lebih murah. Untuk UMKM, inisiatif pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan sumber pendanaan yang signifikan. KUR menyediakan pinjaman bersubsidi pemerintah dengan suku bunga rendah dan proses pengajuan yang relatif mudah.

Selain dari sumber pembiayaan resmi, UMKM juga semakin banyak beralih ke lembaga keuangan non-bank, termasuk tekfin dan perusahaan modal ventura. Melalui platform digital, fintech menyediakan opsi pembiayaan yang lebih cepat dan fleksibel, memungkinkan UMKM untuk mengajukan pinjaman secara online dengan persyaratan yang lebih sederhana dan prosedur yang disederhanakan. Sebaliknya, modal ventura memberi UMKM potensi pengembangan yang signifikan melalui investasi ekuitas. Selain uang, modal ventura juga menawarkan saran dan bantuan untuk pertumbuhan bisnis.

Untuk memanfaatkan peluang yang ada, UMKM perlu meningkatkan literasi keuangan mereka. Literasi keuangan yang baik akan membantu pelaku UMKM memahami produk-produk keuangan yang tersedia, mengelola pembiayaan dengan lebih efektif, dan membuat keputusan bisnis yang lebih bijak. Edukasi dan pelatihan mengenai manajemen keuangan, pencatatan akuntansi, dan strategi bisnis dapat sangat membantu pelaku UMKM untuk lebih siap dalam mengajukan permohonan pembiayaan dan mengelola dana yang mereka peroleh.

Dalam menghadapi kendala akses pembiayaan, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM sangat penting. Pemerintah perlu terus mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung pembiayaan UMKM, sementara lembaga keuangan harus lebih proaktif dalam menawarkan produk kredit yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Di sisi lain, pelaku UMKM harus meningkatkan literasi keuangan mereka dan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi pembiayaan. Dengan upaya bersama, diharapkan akses pembiayaan bagi UMKM dapat ditingkatkan sehingga sektor ini dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional.

Kurangnya kepercayaan lembaga keuangan terhadap UMKM adalah masalah lain yang harus diselesaikan. Karena UMKM tidak memiliki data keuangan yang memadai dan riwayat kredit yang kuat, lembaga keuangan sering memandang mereka sebagai industri yang berisiko tinggi. UMKM harus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen bisnis mereka dan membina hubungan yang positif dengan lembaga keuangan untuk mengatasi hal ini. Untuk meningkatkan kapasitas dan kredibilitas mereka di mata pemberi pinjaman, para pelaku UMKM juga dapat mengambil manfaat dari program pelatihan dan pendampingan yang disediakan oleh berbagai organisasi.

Dengan demikian, peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM harus terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia. Edukasi keuangan, penyederhanaan prosedur, dan pengembangan alternatif pembiayaan menjadi kunci untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, UMKM dapat berperan optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui berbagai upaya ini, diharapkan UMKM di Indonesia dapat mengakses pembiayaan dengan lebih mudah dan merata, sehingga mampu berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

### **C. Inovasi Dalam Pembiayaan UMKM dan Peran Pemerintah serta Kebijakan Pendukung UMKM**

Inovasi dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu solusi yang efektif dalam mengatasi kendala akses ke dana yang seringkali dihadapi oleh pelaku usaha kecil ini. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah penggunaan teknologi finansial atau fintech. Fintech memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih cepat, fleksibel, dan mudah diakses dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Dengan fintech, pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman secara online, memeriksa status aplikasi mereka secara real-time, dan menerima dana dengan lebih cepat. Selain itu, fintech juga menawarkan berbagai produk keuangan inovatif seperti peer-to-peer lending, di mana pelaku usaha dapat meminjam dana langsung dari individu lain, tanpa melalui perantara bank. Inovasi ini tidak hanya memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, tetapi juga mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan dana.

Penciptaan modal ventura sebagai opsi pendanaan untuk UMKM adalah inovasi lainnya. UMKM dengan potensi pengembangan yang signifikan dapat memperoleh dana investasi dari modal ventura dengan imbalan saham ekuitas di perusahaan. Perusahaan modal ventura membantu UMKM berkembang dan tumbuh dengan menawarkan saran dan dukungan strategis selain uang tunai. UMKM yang ingin berkembang namun tidak memiliki aset atau jaminan yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman bank akan sangat diuntungkan. UMKM bisa mendapatkan uang yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan, pengembangan produk baru, atau perluasan pasar melalui modal ventura. Selain inovasi keuangan, peran pemerintah dalam membantu UMKM juga cukup penting. Untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pendanaan, pemerintah telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan inisiatif. Kredit Usaha Rakyat (KUR), salah satu program yang paling terkenal, menawarkan pinjaman dengan suku bunga rendah dan proses pengajuan yang mudah. Ribuan UMKM di Indonesia telah menerima manfaat dari bantuan KUR untuk mendapatkan modal yang mereka butuhkan untuk berkembang. Selain KUR, pemerintah juga menawarkan bantuan dana tunai, penjaminan kredit, dan subsidi bunga kepada UMKM yang membutuhkan.

Meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM adalah fungsi lain dari pemerintah. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pencatatan akuntansi, strategi bisnis, dan manajemen keuangan melalui berbagai inisiatif pendidikan dan pelatihan. Agar UMKM dapat mengelola uang yang mereka terima dengan baik dan efisien serta membuat keputusan bisnis yang tepat, mereka harus memiliki literasi keuangan yang kuat. Dengan menetapkan undang-undang yang mendorong perluasan fintech dan modal ventura, pemerintah juga mendorong kemajuan teknologi dan inovasi dalam industri keuangan. Melalui berbagai kebijakan makroekonomi dan infrastruktur pendukung, pemerintah juga berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung ekspansi UMKM. Misalnya, penciptaan infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang cepat dan luas, serta penyederhanaan aturan dan birokrasi perusahaan. Agar UMKM dapat berkembang lebih cepat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional, semua inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan iklim bisnis bagi mereka.

Oleh karena itu, keterlibatan proaktif pemerintah dan pendanaan yang inovatif sangat penting untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Agar UMKM memiliki akses yang lebih luas dan merata terhadap pendanaan, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta penerapan teknologi dan inovasi, sangatlah penting. UMKM dapat berkembang dan tumbuh, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dengan peningkatan akses pendanaan. Diharapkan bahwa upaya kerja sama ini akan menghasilkan perkembangan yang menguntungkan dan tahan lama bagi sektor UMKM Indonesia.

#### **D. Rekomendasi Strategis Peningkatan Akses Pembiayaan Untuk UMKM**

Untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), diperlukan rekomendasi strategis yang komprehensif dan berkelanjutan. Langkah pertama yang perlu diambil adalah penyederhanaan prosedur kredit. Lembaga keuangan harus mempertimbangkan penyederhanaan persyaratan administrasi dan dokumentasi yang sering kali menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam mengakses pembiayaan. Dengan memperkenalkan proses yang lebih efisien dan berbasis teknologi, seperti sistem online untuk pengajuan pinjaman, lembaga keuangan dapat mempercepat waktu pemrosesan dan mengurangi beban birokrasi yang dihadapi oleh UMKM.

Meningkatkan literasi keuangan peserta UMKM juga merupakan salah satu taktik yang paling penting. Untuk menawarkan program pelatihan dan pendidikan yang berkonsentrasi pada manajemen keuangan, pencatatan akuntansi, dan perencanaan perusahaan, pemerintah, lembaga keuangan, dan kelompok-kelompok non-pemerintah harus berkolaborasi. UMKM yang memiliki literasi keuangan yang kuat akan lebih mampu memenuhi standar kredit yang ditetapkan oleh lembaga keuangan dan mengelola uang mereka dengan lebih efektif dan efisien.

Menciptakan sumber pendanaan alternatif adalah langkah strategis penting lainnya yang harus dilakukan. Fintech, atau teknologi finansial, adalah salah satu penemuan yang menjanjikan. Fintech menggunakan platform digital untuk menyediakan opsi pendanaan yang lebih cepat dan fleksibel. UMKM dapat mengajukan pinjaman secara online, memverifikasi status aplikasi mereka secara real time, dan mendapatkan pendanaan lebih cepat dengan menggunakan teknologi digital. Fintech juga dapat melayani UMKM di lokasi-lokasi terpencil yang sulit diakses oleh lembaga keuangan tradisional dengan menawarkan layanan keuangan yang lebih inklusif dan dengan harga terjangkau.

Opsi pendanaan alternatif untuk UMKM yang menjanjikan adalah modal ventura dan urun daya. Selain uang, modal ventura menawarkan arahan dan bantuan strategis untuk pertumbuhan bisnis. Melalui platform online, urun dana memungkinkan peserta UMKM untuk mengumpulkan uang dari banyak orang. UMKM dengan potensi pengembangan yang kuat namun tidak memiliki aset atau agunan yang cukup untuk mendapatkan pinjaman bank dapat mengambil manfaat dari kedua pendekatan ini.

Pemerintah memainkan peran penting dalam memfasilitasi akses yang lebih besar bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Pemerintah dapat membuat peraturan dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan UMKM, seperti subsidi bunga dan skema penjaminan kredit, serta insentif bagi bank untuk memberikan pinjaman kepada UMKM. Untuk membuat lingkungan bisnis yang lebih ramah terhadap UMKM, pemerintah juga harus membangun infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet yang cepat dan luas, serta menyederhanakan peraturan dan birokrasi bisnis.

Untuk menciptakan lingkungan yang mendorong perluasan dan keberlanjutan UMKM, kerja sama antara sektor publik dan swasta, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM pada akhirnya diperlukan. Kolaborasi berbagai pemangku kepentingan ini akan memungkinkan untuk mengembangkan inovasi keuangan baru, meningkatkan literasi keuangan, dan meningkatkan kapasitas UMKM. Dengan demikian, UMKM dapat berkembang lebih cepat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, dan mendorong perekonomian nasional.

Rekomendasi strategis ini diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Dengan peningkatan akses pembiayaan yang lebih baik, UMKM dapat lebih mudah mendapatkan dana yang diperlukan untuk mengembangkan usaha, berinovasi, dan bersaing di pasar global. Hal ini tidak hanya akan memperkuat sektor UMKM, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak, UMKM juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDB negara dan membagi pendapatan secara lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat. Peran UMKM sebagai pilar ekonomi nasional sangat nyata, terutama dalam mengatasi krisis ekonomi global dan menciptakan stabilitas ekonomi lokal. Namun demikian, industri ini masih menghadapi tantangan yang cukup besar, seperti terbatasnya ketersediaan pendanaan. Karena sejumlah masalah, termasuk kurangnya agunan, kurangnya literasi keuangan, dan proses perbankan yang dianggap berbelit-belit dan birokratis, banyak UMKM yang merasa kesulitan untuk mendapatkan pendanaan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka.

Salah satu hambatan terbesar bagi UMKM untuk mewujudkan potensi penuh mereka adalah akses terbatas ke pendanaan. Di sisi lain, lembaga keuangan sering menganggap UMKM sebagai industri yang berisiko tinggi karena tidak memiliki agunan yang memadai dan data keuangan yang dapat diandalkan. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Minimnya pengetahuan tentang opsi-opsi pendanaan alternatif, termasuk tekfin, modal ventura, atau inisiatif pemerintah yang dapat mempermudah UMKM mendapatkan modal, memperparah masalah ini. Tindakan strategis yang melibatkan semua pemangku kepentingan diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengembangkan kebijakan yang membantu, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menawarkan pinjaman bersubsidi dengan bunga rendah. Untuk membantu pelaku UMKM mengelola keuangan perusahaan dengan lebih baik dan memenuhi permintaan lembaga keuangan, pemerintah juga dapat memberikan edukasi dan pelatihan keuangan. Penciptaan infrastruktur digital yang memudahkan UMKM untuk mengakses fintech dan sumber pendanaan berbasis teknologi lainnya adalah cara lain yang bisa dilakukan pemerintah.

UMKM kini memiliki lebih banyak pilihan berkat fintech, salah satu terobosan dalam industri keuangan. Fintech menawarkan layanan keuangan yang lebih fleksibel, cepat, dan efektif dengan memanfaatkan teknologi digital. Metode pinjaman peer-to-peer, misalnya, memungkinkan UMKM untuk meminjam uang secara langsung dari orang atau organisasi masyarakat tanpa melalui lembaga perbankan konvensional. Sumber pembiayaan lain yang layak untuk UMKM dengan potensi pengembangan yang signifikan adalah modal ventura. UMKM menerima dukungan strategis yang membantu pengembangan bisnis mereka selain suntikan dana melalui investasi modal ventura. Namun, untuk menawarkan layanan pinjaman yang lebih inklusif kepada UMKM, lembaga keuangan konvensional seperti bank dan koperasi harus berinovasi. UMKM akan lebih mudah mendapatkan pendanaan jika prosedur kredit dibuat lebih

sederhana, persyaratan administratif dikurangi, dan suku bunga diubah. Pendekatan yang lebih proaktif, seperti menawarkan bantuan keuangan dan menggunakan data digital untuk evaluasi kredit yang lebih tepat, juga diperlukan oleh lembaga keuangan untuk meningkatkan kepercayaan mereka terhadap UMKM.

Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat juga merupakan elemen penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Kerja sama ini dapat berupa inisiatif pendidikan dan pelatihan keuangan, pemberian akses terhadap teknologi yang sesuai, dan pemasaran produk UMKM daerah baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, sinergi antara berbagai pihak juga dapat mempercepat adopsi teknologi oleh UMKM yang pada akhirnya membantu mereka menjadi lebih kompetitif di era digital. Ada banyak keuntungan dari memperluas akses UMKM ke pembiayaan. UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, menjangkau pasar yang lebih luas, dan menghasilkan barang yang inovatif dan berkualitas tinggi jika mereka memiliki akses terhadap pendanaan yang memadai. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar lokal dan menciptakan lebih banyak prospek ekspor, yang akan meningkatkan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Namun, UMKM yang berkembang dan sukses juga menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, UMKM merupakan komponen kunci dari pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, selain sebagai penggerak ekonomi lokal.

Diharapkan UMKM di Indonesia dapat mengatasi hambatan pembiayaan dan tumbuh menjadi industri yang lebih kuat dan kompetitif dengan sejumlah tindakan yang diperhitungkan dan kerja sama yang erat. UMKM, yang merupakan fondasi ekonomi nasional, memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong ekspansi ekonomi, memberikan pemerataan kesejahteraan, dan meningkatkan posisi Indonesia di dunia internasional. Seluruh rakyat Indonesia dapat memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan jika UMKM mendapatkan pendampingan yang tepat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, F. M. A., Rosidta, A., & Lazuardi, A. (2024). Pengembangan Model Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 29-38. <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v2i1.17>
- Anwar, M., Mursyidah, A., & Bolivian, B. (2023). MEMPROGRAMKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA CIMANGGU I, KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR. *SAHID DEVELOPMENT JOURNAL*, 2(02), 20-29. <https://doi.org/10.56406/sahiddevelopmentjournal.v2i02.85>
- Fadillah, M. N., Eliza, E., Susilo, D. D., Muhammadi, N., & Permadi, N. (2024). CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH M-PROGRESS*, 14(2), 278-287. <https://doi.org/10.35968/m-pu.v14i2.1226>
- Ferazona, S., Suyono, A., Saputra, R. E., & Defriona, B. (2024). Pentingnya Literasi Keuangan Digital Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 358-365. <https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v5i2.184>
- Haryanti, N. (2024). Peningkatan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 1(2), 122-136. <https://doi.org/10.35457/transgenera.v1i2.3795>
- Khoiriyah, A., & Ansori, M. (2024). Peran Fintech Peer to Peer Lending Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(4), 1434-1445. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i4.1586>
- Kurniawan, V., Faisal, M., Ansori, R., & Pangaribuan, R. Y. (2024). PENGARUH UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENEGAH) TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN INDONESIA

- TAHUN 2024. Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 9(4), 111-120. <https://doi.org/10.8734/musytari.v9i4.6416>
- Lestari, K. M., Budiman, M. D. D. I., Filardhy, M. K., Zamba, N., Nurhaliza, N. S., Alfiani, M., & Wardiah, M. L. (2024). Pengaruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Perekonomian di Indonesia. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(2), 1323-1330.
- Marlina, A. S., & Fatwa, N. (2021). Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 412-422. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7804](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7804)
- Perdana, M. A. C., Sulistyowati, N. W., Ninasari, A., & Mokodenseho, S. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan, Skala Usaha, dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia terhadap Profitabilitas UMKM. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(03), 135-148. <https://doi.org/10.58812/sek.v1i03.120>
- Rahmawati, D., Apriady, M. N., & Wisudanto, W. (2024). CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM), AKIBAT MENINGKATNYA JUMLAH PELAKU UMKM DI INDONESIA. *Sebatik*, 28(1), 33-40. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v28i1.2403>
- Restiani, V., Marzuki, S. N., & Jumriani, J. (2024). Penyaluran Pembiayaan KUR Syariah Dalam Upaya Penambahan Modal Guna Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada PT. Pegadaian UPC Mare. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 2(5), 385-401. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i5.189>
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran fintech dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61-73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>
- Yolanda, C. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170-186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>
- Yuwana, S. I. P., Maulidah, A. R., Alya, A., & Wulandari, A. (2024). Sistem Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan Prinsip Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S Parman. *KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research*, 1(1), 62-68.
- Zuhra, S. A. (2024). Dampak Pembiayaan Terhadap Kinerja Usaha Mikro. *VALUE*, 5(2), 37-49. <https://doi.org/10.36490/value.v5i2.1405>.